



Kerjasama Anti-Perdagangan Narkoba Amerika Serikat dan Kuba Sebagai Isu Keamanan Nasional Pada Era Pemerintahan Donald J. Trump

Ranisa Esmeralda Taufik

Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro

Jalan Prof. H. Sudarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269

Website: <http://www.fisip.undip.ac.id> Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

Despite all of the conflicts involving the two countries, in reality, the United States of America has an anti-drug trafficking cooperation with Cuba. This research aims to explain the reason on why the U.S. wants the cooperation. The non-traditional security concept will assist this research in explaining the aforementioned cooperation between the U.S. and Cuba. In this advanced era, drugs have evolved into one of the complex problems that is included in the issues of non-traditional security. As for the countermeasure, the non-traditional security concept believes that transnational approach is the perfect way to do it. Under the government of President Trump, U.S. seemed to be more focused on domestic countermeasures. While Cuba, as the weaker state and has less power, is also threatened by the troubling problems that arises from drugs. Therefore, the cooperation between the two countries is deemed as the perfect way to countermeasure all of the problems spiraling from drugs and to protect the national security of each country.

Keywords: *United States of America, Cuba, drugs, cooperation, non-traditional security*

PENDAHULUAN

Kuba dan Amerika Serikat terkenal akan hubungan keduanya yang pelik sejak tahun 1959. Namun, hal ini nyatanya tidak menghentikan keduanya dalam bekerjasama secara intensif guna menanggulangi perdagangan narkoba. Kerjasama kedua negara dalam hal ini pun semakin meningkat ketika Amerika Serikat berada di bawah pemerintahan Presiden Barack Obama. Salah satu janji kampanye Presiden Obama pada tahun 2008 adalah untuk menciptakan “awal yang baru” dengan Kuba (LeoGrande 2017, p. 1). Pada tanggal 17 Desember 2014, Obama dan Castro akhirnya mengumumkan bahwa kedua negara akan melanjutkan hubungan diplomatiknya yang kemudian secara resmi berlaku kembali pada tanggal 20 Juli 2015 (Cocoli 2016). Hubungan kedua negara yang membaik ini juga memberikan dampak positif terhadap kerjasama keduanya dalam penanganan perdagangan narkoba.

Kerjasama kedua negara yang semakin meningkat ini menjadi terancam ketika Presiden Donald J. Trump mengambil alih tampuk kekuasaan Amerika Serikat sejak tanggal 21 Januari 2017. Menurut Trump, perjanjian yang dibuat oleh Presiden Obama dengan Kuba hanya

menguntungkan rezim Castro dan bukan rakyat Kuba (Cocoli 2016). Terlepas dari seluruh pernyataan tersebut, pada kenyataannya banyak kebijakan Presiden Obama terhadap Kuba yang tetap berlaku di bawah pemerintahan Presiden Trump. Terdapat beberapa perjanjian bilateral dari pemerintahan sebelumnya yang tidak diubah di bawah pemerintahan Presiden Trump, termasuk di dalamnya adalah perjanjian terkait kerjasama anti-perdagangan narkoba (Kunović 2017).

Amerika Serikat sendiri memang dikenal sebagai salah satu pasar narkoba terbesar di dunia. Berbagai masalah terkait narkoba seperti ancaman opioid yang telah mewabah dan tidak menunjukkan tanda-tanda untuk mereda, ancaman metamfetamin yang terus menerus, kembali meningkatnya ancaman kokain, zat psikoaktif baru (*new psychoactive substances/NPS*) yang juga menjadi tantangan, serta permasalahan terkait ganja di tingkat domestik yang kian berkembang terus mengganggu Amerika Serikat (U.S. Department of Justice 2018). Kuba, di sisi lain, bukan merupakan negara konsumen, produsen maupun transit untuk narkoba terlepas dari lokasinya yang berdekatan dengan para eksportir narkoba terbesar di wilayahnya dan pasar Amerika Serikat (United States Department of State 2017, p. 142). Bila dilihat dari kondisi kedua negara, tidak terdapat alasan yang kuat bagi kedua negara untuk tetap melanjutkan kerjasama dalam penanganan perdagangan narkoba di saat keduanya tidak memiliki kepentingan yang sama dan terdapat banyak konflik lain yang melibatkan A.S.-Kuba. Namun seperti yang dijelaskan sebelumnya, Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Presiden Donald J. Trump tetap melanjutkan kerjasama dengan Kuba terkait anti-perdagangan narkoba.

Penelitian terdahulu mengenai kerjasama A.S. dan Kuba lebih berfokus pada pembahasan kerjasama kedua negara secara umum, seperti penelitian dari Lambrecht yang berargumen bahwa terdapat 4 faktor yang melatarbelakangi hal tersebut yakni keamanan, politik domestik, dan kepentingan ekonomi Amerika Serikat serta perubahan kondisi politik dan ekonomi dalam masyarakat Kuba. Kemudian Foreign Policy Research Institute yang pada intinya membahas secara umum mengenai penyebab Kuba begitu kuat dalam melaksanakan kerjasama penanggulangan narkoba. Penelitian ini maka bermaksud untuk mencari tahu mengapa A.S. melaksanakan kerjasama anti-perdagangan narkoba dengan Kuba tersebut. Konsep keamanan non-tradisional menitikberatkan pada pendekatan transnasional sebagai upaya untuk menanggulangi masalah-masalah keamanan non-tradisional (Behera 2013, p. 230). Hal ini akan membantu penelitian ini dalam menjelaskan penyebab dibalik kebijakan A.S. dalam melaksanakan kerjasama anti-perdagangan narkoba dengan Kuba. Penelitian ini berargumen bahwa karena narkoba merupakan salah satu isu dari konsep keamanan non-tradisional, maka pendekatan yang perlu dilakukan untuk menanggulangnya bersifat transnasional. A.S. di bawah pemerintahan Presiden Trump yang lebih terfokus pada upaya-upaya domestik dan perannya yang semakin menurun dalam perang terhadap narkoba akan mendapatkan keuntungan dari kerjasamanya dengan Kuba. Di sisi lain, Kuba sebagai negara yang lebih lemah dan tidak sekuat A.S. juga akan diuntungkan dari kerjasama ini dalam melindungi keamanan nasionalnya.

PEMBAHASAN

Permintaan narkoba dari pasar A.S. adalah kunci utama cepatnya pertumbuhan industri paling menguntungkan di dunia ini (Griffith 1998, p. 99). Epidemik opioid ilegal yang didorong oleh para kartel narkoba serta penyelundup fentanil dari Tiongkok telah membunuh puluhan ribu warga A.S. setiap tahunnya (White House 2017a, p.12). Para organisasi kejahatan ini juga melemahkan para sekutu dan rekan Amerika Serikat dengan mengkorupsikan dan

merusak institusi demokrasi negara-negara tersebut (White House 2017a, p. 12). Sedangkan menurut Kuba, pada tahun 2018 terdapat peningkatan ancaman secara global dari perdagangan narkoba. Hal ini disebabkan oleh variasi rute yang terus bertambah, skema operasi, metode pembungkusan, tren negatif di dunia internasional yang melegalkan ganja, penggunaan rute tradisional yang dekat dengan teritori nasional Kuba secara terus menerus, serta kelompok kriminal dan para emigran Kuba yang berkeinginan untuk memperkenalkan narkoba di pulau tersebut (Fernandez 2019).

Pada bulan Mei 2017, sebuah kelompok antar-agensi melaksanakan rapat untuk menilai hasil-hasil dari *policy review* dan membuat rekomendasi untuk Presiden Trump (LeoGrande 2017, p. 5). Hasilnya, setiap agensi melaporkan bahwa kebijakan kerjasama bekerja dengan baik pada area masing-masing agensi sehingga dapat dilanjutkan, namun White House menolak konsensus ini (LeoGrande 2017, p. 5). Atas hal tersebut, para petinggi di Capitol Hill yang merupakan campuran Kuba-Amerika terus menekan dan mengingatkan pemerintah bahwa Presiden Trump telah berjanji selama kampanye untuk mengembalikan seluruh kebijakan Obama (LeoGrande 2017, p. 5). Hal ini membuat White House akhirnya mengambil alih proses tersebut dari birokrasi (LeoGrande 2017, p. 5). Pada intinya, Presiden Trump menugaskan kabinetnya untuk bekerja bersama dalam mencari cara guna meningkatkan “perjanjian buruk” yang telah dilakukan oleh Presiden Obama (White House 2017b).

Tekanan dari kedua kubu yang berbeda ini akhirnya membuat pemerintah menghasilkan kebijakan akhir yang tetap dapat dikatakan “mengembalikan” kebijakan Presiden Obama namun bersifat jauh lebih ringan dari yang diajukan oleh Diaz-Balart dan Rubio sebelumnya. (LeoGrande 2017, p. 6). Memorandum Presidensial Keamanan Nasional yang ditandatangani oleh Presiden Trump pada tahun 2017 memang memperketat embargo terhadap Kuba pada beberapa area, namun meninggalkan arsitektur dasar dari kebijakan Obama untuk tetap berlangsung (LeoGrande 2017, p. 6).

Dalam *fact sheet* yang dikeluarkan oleh White House terkait langkah-langkah untuk menangani adiksi narkoba dan penyalahgunaan opioid, dikatakan bahwa Presiden Trump mengerahkan keseluruhan pemerintahannya untuk menanggulangi permasalahan tersebut dengan mendeklarasikan darurat keamanan publik nasional (White House 2017c). Pada INCSR 2014, dikatakan bahwa para penyelundup biasanya berusaha untuk menghindari kapal maupun pesawat patroli A.S. dan Kuba dengan melewati pinggiran perairan teritorial Kuba (Bureau for International Narcotics and Law Enforcement Affairs 2014). Hal ini semakin menunjukkan keberhasilan dan efektivitas kerjasama kedua negara. Kuba secara terbuka juga telah berjanji untuk menjaga negaranya dari perdagangan narkoba dan menunjukkan elemen-elemen dari negaranya terkait keketatan terhadap narkoba kepada A.S. (Bellezza-Smull 2017, p.2).

Kebijakan pengetatan perbatasan dengan Meksiko oleh A.S. dan potensi Kuba untuk menjadi negara transit akibat dari letak geografisnya memberikan keduanya alasan kuat untuk melakukan kerjasama. Amerika Serikat dalam hal ini, membutuhkan Kuba yang meskipun tidak memegang peran utama dalam perdagangan narkoba melalui jalur Karibia, namun merupakan salah satu dari sedikit negara yang cukup berhasil dalam menekan angka perdagangan narkoba di negaranya. Selain itu, peran A.S. dalam *war on drugs* juga dianggap mulai merosot. Global Commission on Drug Policy, sebuah organisasi non-pemerintah yang mendukung pembentukan rezim global dalam pengontrolan narkoba, mengkritik inisiatif A.S. pada bulan September 2018 yang bernama “Global Call to Action on the World Drug Problem” (Global Commission on Drugs 2018). Inisiatif ini dinilai mahal, berbahaya dan tidak

efisien karena selama lebih dari 50 tahun, metode represif dalam mengurangi jumlah pasokan narkoba macam ini telah terbukti mahal dan tidak produktif (Global Commission on Drugs 2018).

Operasi narkoba memang bersifat universal namun, tidak sama pada tiap negara dan dampak yang ditimbulkannya pada masyarakat di seluruh dunia (Griffith 1993-4, p. 19). Bahkan, penggunaan beberapa senjata paling modern untuk mengatasi operasi narkoba memberikan keuntungan yang hampir nihil (Griffith 1993-4, p. 19). Hal ini menunjukkan bagaimana negara-negara membutuhkan satu sama lain untuk bekerjasama secara baik dalam menanggulangi perdagangan narkoba. Meskipun sebelumnya telah dijelaskan bagaimana upaya A.S. dalam menanggulangi permasalahan narkobanya di dalam negeri, pada kenyataannya, upaya yang dilakukan A.S. dalam tingkat internasional tidak sehebat yang dikatakan.

Meskipun suatu negara terbilang lemah dan memiliki kekuasaan yang kecil, negara tersebut bisa saja memiliki sesuatu yang dapat mengatribusi kepentingan untuk pihak lain (Buzan 1983, p. 74). Oleh karenanya, negara-negara ini dapat menjadi menggiurkan ataupun mudah untuk diancam oleh negara yang lebih kuat (Buzan 1983, p. 74). Kuba seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, memiliki kemampuan yang jauh lebih baik dari negara-negara Karibia lainnya dalam hal penanggulangan narkoba. Ditambah dengan kesediaan Kuba untuk bekerjasama dengan A.S. terlepas dari konflik yang melibatkan keduanya maka menjadi poin tambah bagi A.S. untuk melaksanakan kerjasama guna melindungi keamanannya. Selain itu, faktor geografis juga dapat menjadi pencegah yang perlu diperhitungkan (Buzan 1983, p. 74). Contohnya adalah Jerman Timur yang lebih rentan terhadap ancaman militer daripada Perancis ataupun Jepang (Buzan 1983, p. 74). Maka jarak Kuba yang juga berdekatan dengan negara bagian Florida dapat menguntungkan A.S.

Konsep keamanan non-tradisional melakukan analisis dari tingkatan paling rendah yakni individu hingga berbagai sumber identitas kolektif (termasuk birokrasi, negara, kawasan, peradaban) hingga tingkat sistem internasional (Buzan 1991, 1995 dalam William 2008, p. 7). Pada skema ini, diperlukan fokus terhadap hubungan dan tegangan yang tidak terelakkan pada berbagai tingkat analisis (Buzan 1991, 1995 dalam William 2008, p. 7). Maka di bawah pemerintahan Presiden Trump yang lebih berfokus pada penanggulangan secara domestik, tawaran kerjasama dari Kuba menjadi pilihan yang masuk akal untuk diambil yang dapat membantu penanggulangan permasalahan ini baik di tingkat negara dan berdampak pada masyarakat A.S. maupun tingkat transnasional. Upaya A.S. dalam menanggulangi permasalahan narkoba negaranya di tingkat domestik dan transnasional ini sejalan dengan pengertian keamanan yang dijelaskan di awal yakni untuk mencapai nilai-nilai keamanan, dengan mengurangi kemungkinan ancaman yang dalam hal ini timbul dari narkoba.

Layaknya kerjasama keamanan bilateral manapun, pembagian informasi akan menjadi komponen kritical untuk kerjasama di masa yang akan datang (Bach, Espach dan Rosenau 2017, p. 19). Pertukaran informasi dapat memberikan manfaat dan wawasan baru terhadap pasukan keamanan Kuba, menyebabkan kesadaran yang lebih baik lagi terkait pola perdagangan dan kapabilitas untuk melihat ke depan dalam merencanakan serta mengeksekusi operasi patrol maupun penangkapan secara lebih efisien dan efektif (Bach, Espach dan Rosenau 2017, p. 19). Sedangkan bagi Amerika Serikat, pertukaran informasi secara rutin dan kerjasama dengan Kuba dalam memonitor, penangkapan dan menanyakan penyelundup yang tertangkap dapat memperbaiki kontrol A.S. terhadap lepas pantainya di bagian selatan (Bach, Espach dan Rosenau 2017, p. 19). Pertukaran informasi ini juga dapat memberikan

rasionalisasi operasional yang baru bagi Kuba, utamanya dengan negara-negara seperti Jamaika, Republik Dominika dan Meksiko mengingat negara-negara tersebut secara rutin melakukan operasi *counter-narcotics* dengan Amerika Serikat (Bach, Espach dan Rosenau 2017, p. 19).

Kegiatan perdagangan narkoba yang dilakukan oleh berbagai *Drug Trafficking Organization* (DTO) besar maupun para produsen dari luar A.S. memberikan ancaman kesehatan dan keamanan terhadap masyarakat A.S. akibat paparan terhadap fentanil, heroin, kokain serta metamfetamin yang telah membunuh jutaan warga A.S. setiap tahunnya (Office of National Drug Control Policy 2019, p. 13). Peningkatan penggunaan obat-obatan terlarang ini telah membebani pelayanan kesehatan masyarakat A.S. dan menghilangkan produktivitas serta keterlibatan masyarakat (Office of National Drug Control Policy 2019, p. 13). Terlebih lagi, perdagangan narkoba dapat mengakibatkan terciptanya korupsi, pengabaian pemerintah, mengganggu kestabilan negara-negara rekan A.S. serta mendanai berbagai aktivitas ilegal lainnya melalui organisasi kriminal yang luas baik secara domestik maupun internasional (Office of National Drug Control Policy 2019, p. 13).

Keamanan ekonomi dan kaitannya dengan penyalahgunaan narkoba dapat menyebabkan hilangnya produktivitas akibat adiksi, rehabilitasi dan penahanan (Griffith 1993-4, p. 26). Hal ini menyebabkan peningkatan biaya perawatan kesehatan dan pada banyak negara, adiksi terhadap narkoba dapat menimbulkan gangguan terhadap alokasi sumber daya karena mengharuskan pemerintah untuk mendedikasikan sejumlah besar dari sumber dayanya yang langka untuk mengatasi operasi narkoba berikut dengan tindak kejahatan yang mengikutinya (Griffith 1993-4, p. 26). Permasalahan-permasalahan ini pada akhirnya menimbulkan ancaman yang lebih nyata terhadap keamanan negara di seluruh dunia (Griffith 1993-4, p. 12). Selain dari yang telah disebutkan di atas, Griffith menambahkan bahwa efek lain dari penyalahgunaan narkoba adalah pengakselerasian proses hiperinflasi dan menaikkan harga barang serta jasa pada negara-negara berkembang (Grayson 2008, p. 65).

Perdagangan narkoba pada akhirnya juga menimbulkan biaya bagi para pembayar pajak Amerika Serikat setiap tahunnya (Faller 2019, p. 12). Perdagangan narkoba tidak lagi dianggap hanya sebagai ancaman keamanan tapi juga ekonomi yang menimpa seluruh negara di sekitar A.S. (Faller 2019, p. 12). Direktur dari White House Office of National Drug Control Policy (ONDCP) yakni Jim Carroll mengeluarkan *Administration's Fiscal Year (FY) 2020 National Drug Control Budget* yang meminta \$34,6 triliun dolar A.S. untuk upaya penanggulangan narkoba (White House 2019b). Selain ekonomi, ancaman dari narkoba juga dapat dirasakan dari sisi politik yakni timbulnya kekerasan. Menurut *Uniform Crime Report* bulan September 2017, aparat penegak hukum A.S. telah melakukan penangkapan terkait pelanggaran narkoba pada tahun 2016 sebanyak lebih dari \$1,57 juta dolar A.S., meningkat 5,63% dari tahun sebelumnya (Newman dan McDonald 2017). Dalam Strategi Keamanan Nasional A.S. tahun 2017, dikatakan bahwa bahkan dalam pertarungan melawan perdagangan narkoba, pemerintahan Presiden Donald Trump tampaknya lebih berfokus kepada bagian internal, dan spesifiknya pada perbatasan yang "tidak dapat ditembus" daripada negara lain yang merupakan sumber asal dari narkoba tersebut (Guida 2018, p. 210-211).

Di sisi lain, Kuba mengatakan bahwa berbagai upaya pencegahan dan penegakkan telah ditingkatkan pada beberapa provinsi, sektor, lingkungan, dan area yang lebih sulit (Fernandez 2019). Upaya-upaya ini dilakukan dengan tujuan untuk meminimalisasi dampak dari narkoba terhadap masyarakat dan mencegah munculnya kejahatan terorganisir di negara tersebut yang berkehendak untuk menggunakan teritori Kuba sebagai titik henti untuk operasi narkoba di

negara lainnya (Fernandez 2019). Kuba mengklaim bahwa negaranya menyediakan rehabilitasi gratis dan jasa perawatan dari narkoba (Fernandez 2019). Kuba menambahkan bahwa para pelanggar hukum, termasuk di dalamnya terkait narkoba, akan dihukum secara keras (Fernandez 2019).

Penjelasan yang konkret di atas telah menunjukkan bagaimana narkoba menimbulkan permasalahan yang pelik di Amerika Serikat pada berbagai tingkatan mulai dari individu sebagai sasaran utama dari narkoba hingga A.S. sebagai negara yang sebagai akibatnya harus mengurus permasalahan ini. Berdasarkan analisis pada berbagai tingkatan tersebut, maka dapat dilihat bagaimana keamanan nasional A.S. terganggu akibat narkoba sebagai salah satu isu keamanan non-tradisional. Oleh karenanya, pelaksanaan kerjasama dengan Kuba dapat dilakukan sebagai upaya penanggulangan transnasional yang memang dalam konsep keamanan non-tradisional dianggap sebagai jalan yang paling tepat.

Kuba, di sisi lain, meskipun tidak memiliki permasalahan narkoba sepele A.S., juga harus menerima konsekuensinya. Dengan kondisi perekonomian negaranya yang kurang begitu baik bila dibandingkan A.S., maka Kuba harus melakukan berbagai upaya guna mencegah negaranya menjadi korban selanjutnya dari narkoba. Sebagai akibat dari upaya-upaya yang dilakukan Kuba, maka *resource reallocation* dan *productivity loss* juga terjadi. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana berbagai agensi pemerintah negara tersebut berikut dengan rakyatnya harus berupaya bersama dalam mengatasi narkoba, yang tentunya juga membutuhkan pengeluaran dana. Kondisi ini mau tidak mau dapat membuat Kuba menjadi lebih lemah lagi dan semakin kehilangan kekuatannya bila permasalahan narkoba yang pelik melanda negaranya. Oleh karenanya, pelaksanaan kerjasama dengan A.S. yang tentu saja memiliki kekuatan lebih besar daripada Kuba juga dapat menguntungkan Kuba.

Menurut *National Security Strategy A.S.* pada tahun 2017, peningkatan kontrol atas perbatasan dan sistem imigrasi adalah hal yang utama bagi keamanan nasional, kesejahteraan ekonomi dan penegakkan hukum Amerika Serikat (White House 2017d, p. 9). Selain melalui upaya yang agresif dalam mencegah perluasan organisasi kriminal di negaranya, A.S. juga melakukan kerjasama dengan rekan-rekan di luar negeri guna menyerang jaringan-jaringan kriminal, utamanya yang berada di *Western Hemisphere* di mana perdagangan narkoba serta kegiatan kriminalnya memberikan dampak secara langsung terhadap migrasi dan keamanan perbatasan A.S. (Office of National Drug Control Police 2019, p. 14).

Dalam *National Drug Control Policy (NDCP) 2019*, tertulis bahwa dalam mengimplementasikan strateginya untuk mengurangi ketersediaan narkoba di A.S., dilakukan upaya untuk mengganggu, menghancurkan dan mengalahkan para pedagang narkoba beserta rantai pasoknya (Office of National Drug Control Police 2019, p. 14). Pada dokumen ini, A.S. menyatakan anggapannya bahwa hubungan regional memegang peran penting dalam pendekatan internasional A.S. di masa yang akan datang guna memungkinkan terjadinya pertukaran informasi dan mengharmonisasikan kebijakan terkait narkoba untuk menghadapi ancaman yang terus berubah (Office of National Drug Control Police 2019, p. 14). Perlu dicatat bahwa upaya peningkatan ini kembali lagi harus ditambahkan dengan peningkatan upaya dan kerjasama dari rekan-rekan luar negeri yang dapat memberikan informasi vital dalam pola perdagangan narkoba dan asetnya yang ditujukan kepada A.S. (Office of National Drug Control Police 2019, p. 15).

Para pejabat anti-narkoba A.S. dan Kuba telah melakukan pertemuan secara teratur baik di Kuba maupun Florida setelah revisi kebijakan dilakukan oleh Presiden Obama pada akhir tahun 2014 (Woody 2017). Kemudian pada tahun 2015, para personel dari masing-masing

negara pertama kalinya diizinkan untuk saling berkomunikasi secara langsung terkait pengejaran terhadap para penyelundup narkoba (Woody 2017). Pada bulan Juli 2016, dibentuklah Kerjasama Operasional antara Amerika Serikat dan Kuba yang ditujukan untuk melawan perdagangan ilegal narkoba dan psikotropika. Kemudian pada bulan Januari 2017, ditandatangani Memorandum of Understanding untuk kerjasama para penegak hukum. Diketahui bahwa salah satu poin dari MoU tersebut adalah kerjasama dalam penanggulangan narkoba. Adapun MoU ini dilaksanakan berdasarkan kesadaran akan dampak negatif dari kejahatan transnasional terhadap keamanan nasional kedua negaranya yang salah satunya juga mencakup perdagangan narkoba (U.S. Embassy in Cuba, 2017). Atas landasan tersebut maka MoU ini ditujukan untuk mempromosikan dan memperluas kerjasama operasional dalam menangani perdagangan narkoba dengan tetap menghormati prinsip-prinsip kedaulatan serta sikap non-intervensi terhadap permasalahan internal kedua negara (U.S. Embassy in Cuba, 2017).

Menurut konsep keamanan, keamanan sendiri merupakan alat politik yang kuat dalam mengklaim perhatian pemerintah untuk diprioritaskan (William 2008, p. 1). Permasalahan narkoba A.S. yang telah begitu pelik hingga mengalami krisis opium ini maka berhasil untuk menarik perhatian pemerintah A.S. dalam penanggulangannya. Namun seperti yang telah dijelaskan di awal, perhatian pemerintah A.S. di pemerintahan Presiden Trump ini lebih kepada penanggulangan secara domestik. Sedangkan penanggulangan yang baik menurut konsep non-tradisional harus juga dilakukan secara transnasional mengingat isu-isu di dalamnya, termasuk narkoba, bukan hanya permasalahan domestik suatu negara. Hal ini maka dapat semakin menjelaskan penerimaan tawaran kerjasama dari Kuba oleh Amerika Serikat.

Sebagai ancaman eksternal dengan manifestasi internal, produksi narkoba perlu untuk ditemukan, dianalisa kemudian dikategorikan untuk menyediakan pengetahuan dasar yang dapat dimanfaatkan guna mengetahui akar dari aliran narkoba yang masuk ke dalam A.S. (Grayson 2008, p. 63). Tantangan-tantangan ini adalah “isu interdependensi” transnasional, bila menggunakan pemikiran James Rosenau, dan “permasalahan tanpa batas”, bila menggunakan kata-kata milik negarawan internasional Kofi Annan (Griffith 2003, p. 21). Oleh karenanya, dibutuhkan kerjasama yang baik untuk mengatasi permasalahan terkait narkoba.

Pemerintahan Presiden Trump tidak tampak akan hanya mengurus area-area yang “secara tradisional” tidak diminati oleh presiden-presiden A.S. sebelumnya; namun tidak juga berarti bahwa pemerintahan ini akan melakukan hal-hal “bertujuan baik” dengan prospek yang memungkinkan hubungan baru yang lebih baik di antara negara-negara Amerika (Guida 2018, p. 201). Yang tampak saat ini oleh para petinggi A.S. adalah meninggalkan promosi “demokrasi” dan pemerintahan (*soft power*) sebagai tujuan dari kebijakan luar negerinya, dengan kepercayaan yang relatif dalam institusi-institusi multilateral guna menanggulangi permasalahan-permasalahan yang menjadi kepentingan bersama (Guida 2018, p. 201). Pada praktiknya, pemerintahan Presiden Trump tampak meninggalkan beberapa pilar strategi hegemoni A.S. pada beberapa area pasca Perang Dingin (Guida 2018, p. 201).

KESIMPULAN

A.S. di bawah pemerintahan Pemerintahan Trump tampak melemah di sisi perlawanan terhadap narkoba. Hal ini dapat dilihat dari berbagai upaya internasional yang dilakukan A.S. dan dampaknya yang kurang signifikan serta pemotongan biaya terhadap beberapa kegiatan terkait upaya penanggulangan narkoba. Tampak bahwa di bawah Presiden Trump, A.S. berusaha untuk menanggulangi permasalahan narkoba negaranya secara internal. Selain itu,

A.S. juga tampak lebih berfokus dalam penanggulangan isu narkoba secara domestik bila dibandingkan dengan upaya-upaya transnasional. Hal ini tentu saja kurang efektif mengingat narkoba adalah isu transnasional.

Di sisi lain, Kuba yang memiliki pengaruh cukup kuat di Karibia bersikap sangat terbuka untuk melakukan kerjasama dengan A.S. Hal ini dikarenakan pandangan Kuba yang menganggap bahwa narkoba adalah ancaman untuk kedaulatan negaranya namun di sisi lain, kemampuannya dalam menghalau tindak perdagangan narkoba yang semakin kompleks tidaklah cukup. Hal ini ditambah lagi dengan fakta bahwa kebanyakan dari narkoba yang terdampar di perairan Kuba sebagian besar ditujukan untuk pasar A.S.. Dari penjelasan tersebut, dapat dilihat bahwa sebagai konsekuensinya, perdagangan narkoba merupakan ancaman terbesar yang sama-sama dimiliki oleh A.S. dan Kuba.

Kerjasama kedua negara merupakan salah satu perwujudan pendekatan transnasional yang dalam konsep keamanan non-tradisional dianggap paling tepat untuk menanggulangi berbagai isu. Meskipun tingkatan permasalahan yang dimiliki keduanya tidak sama, namun kerjasama di antara A.S. dan Kuba dapat menguntungkan bagi masing-masing negara. A.S. di bawah pemerintahan Presiden Trump yang tampaknya enggan untuk mengeluarkan dana besar dalam upaya internasionalnya dan lebih terfokus pada lingkup domestik sangat terbantu dengan bantuan informasi dari Pemerintah Kuba terkait arus narkoba yang hendak masuk ke negaranya melalui jalur Karibia. Kuba di sisi lain, dapat mendapatkan bantuan yang meningkatkan kemampuannya dalam menghalau narkoba yang melewati negaranya guna mencegah Kuba menjadi negara transit narkoba selanjutnya.

REFERENSI

- Bach, R, Espach, R and Rosenau, W. (2017). 'From Threat to Partner? A Regional Security Framework for Engaging Cuba'. *CNA'S Occasional Paper*.
- Baldwin, David A. (1997). The Concept of Security. *Review of International Studies* (23).
- Behera, Bhagaban. (2013). Drug Trafficking as a Non-traditional Security Threat to Central Asian States. *Jadavpur Journal of International Relations*, 17(2) 229–251 (doi: 10.1177/0973598414535055), [Online]
- Bellezza-Smull, I. (2017). 'Will Cuba Update its Drug Policy for the Twenty First Century?'. *Igarape Institute*, Strategic Note 29.
- Bureau for International Narcotics and Law Enforcement Affairs. (2014). *International Narcotics Control Strategy Report: Drug and Chemical Control*, Vol. 1. Washington, DC: United States Department of State.
- Buzan, Barry. (1983). *People, States and Fear: The National Security Problem in International Relations*. Guildford: Biddles, Ltd.
- Faller, CS. (2019). *Posture Statement of Craig S. Faller: Commander, United States Southern Command, Senate Armed Services Committee*. Washington, DC.
- Fernandez, FA, 2019. "Cuba vs. Illicit Drugs" [online]. Dalam <http://en.granma.cu/cuba/2019-03-26/cuba-vs-illicit-drugs> [Diakses 26 Maret 2019].
- Grayson, K. (2008). *Chasing Dragons: Security, Identity, and Illicit Drugs in Canada*. Toronto: University of Toronto Press.
- Griffith, IL. (1998). *From Pirates to Drug Lords: The Post - Cold War Caribbean Security Environment*. New York: SUNY Press.
- Griffith, IL. (2003). 'The Caribbean Security Scenario at the Dawn of the 21st Century: Continuity, Change, Challenge'. *The North-South Agenda*, no. 65.

- Guida, A. (2018). 'Donald Trump and Latin America'. *Interdisciplinary Political Studies*, Issue 4, No. 1.
- LeoGrande, WM. (2017). 'Reversing the Irreversible: President Donald J. Trump's Cuba Policy'. *Idées d'Amérique*.
- Newman, T & McDonald, T, 2017. 'New FBI Report Shows Drug Arrests Increased in 2016, As Drug War Rages On' [online]. Dalam <http://www.drugpolicy.org/press-release/2017/09/new-fbi-report-shows-drug-arrests-increased-2016-drug-war-rages> [Diakses 17 Maret 2019].
- Office of National Drug Control Policy. (2019). *National Drug Control Strategy*. Washington, DC: Office of National Drug Control Policy.
- White House, 2017c. "President Donald J. Trump is Taking Action on Drug Addiction and the Opioid Crisis" [online]. Dalam <https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/president-donald-j-trump-taking-action-drug-addiction-opioid-crisis/> [Diakses 7 Februari 2019].
- White House, 2017b. "Background Briefing on the President's Cuba Policy" [online]. Dalam <https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/background-briefing-presidents-cuba-policy/> [Diakses 17 Mei 2019].
- White House, 2019a. "White House Seeks Billions in Record Investments to Stop Drug Epidemic" [online]. Dalam <https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/white-house-seeks-billions-record-investments-stop-drug-epidemic/> [Diakses 22 Juni 2019].
- White House, 2019b. "Remarks by President Trump in Briefing on Drug Trafficking on the Southern Border" [online]. Dalam <https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/remarks-president-trump-briefing-drug-trafficking-southern-border/> [Diakses 22 Juni 2019].
- White House. (2017a). *National Security Strategy of the United States of America*. Washington, DC: White House.
- Williams, Paul. (2008). *Security Studies: An Introduction*. Oxon: Routledge.
- Woody, C, 2017. 'Trump's hardline on US relations with Cuba could create a blind spot in a major drug-trafficking corridor' [online]. Dalam <https://www.businessinsider.sg/trump-end-security-cooperation-with-cuba-drug-trafficking-in-caribbean-2017-6/?r=UK&IR=T> [Diakses 5 September 2018].